



Tunggakan BPJS Kelas III Akan Dilunasi

YOGYA, TRIBUN - Tunggakan iuran peserta BPJS Kota Yogyakarta mencapai Rp12 miliar. Pemerintah Kota Yogyakarta akan mengkaji tunggakan iuran peserta BPJS mandiri tersebut, khususnya untuk kelas III.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Vita Yulia menuturkan, mereka yang berada di kelas III dan menunggak pembayaran iuran BPJS dengan alasan ekonomi rencananya akan ditanggung pemerintah melalui dana APBD.

"Dilihat dulu, kalau alasan ekonomi, yang bersangkutan tidak mampu, nanti ada langkah-langkahnya. Apakah dia mau dibayari pemerintah tapi kelas tiga, karena sudah dibayar pemerintah di kelas III, maka tidak boleh pindah kelas," bebernya, Jumat (26/1).

Namun, jangan semua peserta BPJS kelas III di Kota Yogyakarta dibebankan pada pemerintah. Ia meminta agar masyarakat juga mampu menyikapi secara bijak terkait

iuran peserta BPJS. "Targetnya tahun 2019 (BPJS) terintegrasi, pada tahun 2018 ini kami lakukan sosialisasi (integrasi)," urai Vita.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Kota Yogyakarta, Antonius Fokki Ardianto mengatakan total tunggakan peserta BPJS di Kota Yogyakarta per Januari 2018 sekitar Rp12 miliar untuk 27.312 jiwa. Rinciannya meliputi kelas I sebesar Rp7,2 miliar untuk 9.795 jiwa, kelas II sebesar Rp3 miliar untuk 7.180 jiwa, dan kelas III sebesar Rp2,09 miliar untuk 10.337 jiwa.

"Dari data itu sangat ironis karena golongan mampu yang notabene mendaftar golongan I besaran tunggakan rupiahnya sangat besar yaitu menyumbang 58,53 persen dari total tunggakan. Kemudian dari sisi jiwa, golongan tidak mampu yaitu golongan III mencapai 37,85 persen dari total jiwa yang menunggak," tuturnya.

● ke halaman 19

Tunggakan BPJS Kelas III Akan

● Sambungan Hal 13

Dengan situasi yang demikian, lanjutnya, maka menjelang integrasi Jamkesda ke BPJS JKN yang harus tuntas di tahun 2019, se-

makin menguatkan pihaknya bahwa bicara kesehatan adalah hak rakyat.

"Maka nanti ketika proses integrasi terjadi. Harus ada jaminan Pemkot akan hak rakyat tersebut. Konsep dari Komisi D DPRD Kota Yogyakarta sangat tegas bahwa iur bayar BPJS JKN bagi

masyarakat Kota Yogyakarta di kelas III dibiayai oleh APBD," tandas Fokki.

Fokki menambahkan, dengan konsep tersebut, pihaknya sepakat akan membahasnya dengan kajian teknis bersama tim dari Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Bappeda di awal

Februari 2018.

"Sehingga ketika nanti membahas anggaran murni 2019 dari sisi kajian, teknis anggaran sudah selesai. Nantinya diharapkan tidak ada lagi pepatah yang berbunyi orang miskin dilarang sakit tidak terjadi di Kota Yogyakarta. (kur)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 November 2024
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005